



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUH. AKBAR,**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI**
3. NHK : **983218**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.903.923.076**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.269.738.467
2. Tanah Seluas 1.178 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 185.761.538
3. Tanah Seluas 1.590 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.730.765
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.576.923.076
5. Tanah Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 620.769.230

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 800.000.000**

1. MOBIL, MERCY E200K AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, MG MIN BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJA/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



5. MOBIL, MG (BYD) 4 EV LUX CKD (4X2) A/T Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 440.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	89.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	680.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	203.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	500.000.000
Sub Total	Rp.	6.176.173.076
III. HUTANG	Rp.	801.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.375.173.076

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.